

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I	Realisasi s.d Triwulan I 2026	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas					
1.1	Indikator Kinerja 1.1 Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB	Persentase	3,9%	-	N/A	N/A
II	Sasaran kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas					
2.1	Indikator Kinerja 2.1 Persentase efektivitas Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro	Persentase	80%	20%	20%	100%
2.2	Indikator Kinerja 2.2 Persentase efektivitas Penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri	Persentase	80%	20%	20%	100%

2.3	Indikator Kinerja 2.3 Persentase efektivitas Penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global	Persentase	80%	20%	39%	100%
III	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas					
3.1	Indikator Kinerja 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Indeks	3 dari 4	N/A	N/A	N/A
IV	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas					
4.1	Indikator Kinerja 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Presentase	92%	25%	25%	100%

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu : “Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB”.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB

Latar Belakang

Prioritas Nasional 5 (PN 5) dalam RPJMN 2025-2029 menargetkan terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan melalui pembangunan fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi, terintegrasi, dan berdaya saing global. Keberhasilan sasaran ini dicapai salah satunya melalui **peningkatan kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IAKFT) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)**. Untuk mencapai target tersebut, Asisten Deputi Pengembangan IAKFT berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan sektor industri pengolahan non-migas, khususnya Industri AKFT.

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari BPS, Industri AKFT pada Sektor Industri Pengolahan mencakup 9 sub-bidang yaitu: (i) Industri Makanan dan Minuman; (ii) Industri Pengolahan Tembakau; (iii) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; (iv) Industri Furnitur; (v) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (vi) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; (vii) Industri Barang Galian bukan Logam; (viii) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; dan (ix) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki. Dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi Pengembangan IAKFT berkoordinasi erat dengan Kementerian Perindustrian sebagai mitra kerja utama di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2025, Industri AKFT mencatatkan kontribusi signifikan sebesar 65,60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri pengolahan. Peran strategis masing-masing sub-sektor adalah (i) Industri Agro menyediakan bahan baku utama contohnya bagi industri makanan, minuman, dan tekstil (serat alam); (ii) Industri Kimia dan Farmasi, menyediakan input penting dalam proses produksi di industri agro (pupuk, pestisida), tekstil (pewarna, bahan finishing), bahan aktif obat, hingga manufaktur secara umum; dan (iii) Industri Tekstil dan Produk Tekstil sebagai padat karya memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas yaitu penyerapan tenaga kerja dalam skala besar.

Target persentase realisasi rencana aksi Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB tahun 2026 adalah sebesar **3,9%**.

Pengukuran peningkatan kontribusi IAKFT melalui formula:

$$\text{Peningkatan kontribusi IAKFT terhadap PDB(\%)} = \Sigma \frac{(PDB\ IAKFT_t - PDB\ IAKFT_{t-1})}{PDB\ IAKFT_{t-1}} \times 100\%$$

Kontribusi Industri AKFT merupakan kumulatif (penjumlahan) dari 9 sub-bidang industri pengolahan, yaitu:

1. Industri Makanan dan Minuman;
2. Industri Pengolahan Tembakau;
3. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman;
4. Industri Furniture;
5. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional;
6. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik;
7. Industri Barang Galian bukan Logam;
8. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; dan
9. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan data BPS, kontribusi industri AKFT meliputi 9 sub bidang industri pengolahan antara lain (i) Industri makanan dan minuman; (ii) Industri Pengolahan Tembakau; (iii) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman; (iv) Industri Furniture; (v) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (vi) Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; (vii) Industri Barang Galian bukan Logam; (viii) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; (ix) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

Adapun besaran target kinerja pada tahun 2026 sesuai IKU 1.1. adalah Persentase Realisasi Rencana aksi Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB tahun 2026 adalah sebesar **3,9%***.

Persentase Realisasi Rencana aksi Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB tahun 2026 merupakan target tahunan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	% Kinerja
Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB	Presentase	3,9*	N/A**	N/A**

*target tahun 2026, **Belum Rilis BPS

Persentase realisasi peningkatan kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB tidak dilakukan pengisian karena periode pelaporan dilakukan secara tahunan. Namun demikian, seluruh rencana aksi pada triwulan I yang mendukung peningkatan kontribusi sektor Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB telah dilaksanakan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) 5 RPJMN 2025-2029, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Sasaran Strategis yaitu “Terwujudnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas” untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Rencana aksi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan isu dan Permasalahan strategis terkait produktivitas dan daya saing Industri AKFT;
2. Pengumpulan data dan informasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Industri AKFT.

Adapun pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Peningkatan Kontribusi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil terhadap PDB			
	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Pemetaan isu dan Permasalahan strategis terkait produktivitas dan daya saing Industri AKFT	Terlaksana	Telah dilaksanakan pemetaan isu dan permasalahan strategis melalui beberapa kegiatan ; a. Delegasi RI dalam Bilateral Policy Dialogue and Technology Exchange on Grid Flexibility and Hydrogen; dan Wilton Park Dialogue on “Industrial Strategy: Global Partnership for Frontier Industries and New Supply Chains”, 9-11 Februari 2026 b. Diskusi Perkembangan Kinerja Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IAKFT) tanggal 5 Maret 2026 c. FGD “Strategi Integrasi Bahan Baku Berkelanjutan (Sustainable Material) dalam Rantai Pasok Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil” tanggal 12 Maret 2026
2	Pengumpulan data dan informasi untuk meningkatkan produktivitas dan	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait antara lain: a. Penyampaian Masukan untuk Pertemuan ke-7 WGTII

	daya saing Industri AKFT		RI-Rusia pada tanggal 13 Februari 2026 b. FGD Strategi Integrasi Bahan Baku Berkelanjutan (Sustainable Material) dalam Rantai Pasok Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil tanggal 12 Maret 2026
--	--------------------------	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Turut hadir pada Sosialisasi Peraturan BPS Nomor 7/2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Implementasi pada Perizinan Berusaha berbasis Risiko pada 5 Januari 2026
2. Ikut serta dalam Rapat Harmonisasi RPP RIPIN tanggal 7 Januari 2026 dan Rapat Pembahasan RPP RIPIN Tahun 2025-2045 pada 23 Februari 2026
3. Menghadiri Rapat Persiapan SKB ke-14 RI-Rusia, SKB ke-8 RI-Belarus, dan Pertemuan ke-7 WGTII RI_Rusia pada 3 dan 4 Maret 2026
4. Ikut serta dalam rangkaian rapat Harmonisasi RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan pada tanggal 7 dan 9 Januari 2026, 3 Februari 2026, dan 26 Februari 2026.
5. Turut menyampaikan masukan tertulis atas Draft Submission Indonesia terkait Investigasi Section 301 Amerika Serikat mengenai *Structural Excess Capacity* dan *Forced Labour* pada tanggal 31 Maret 2026.
6. Ikut serta dalam rapat pleno harmonisasi RPermenperin tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Penolong (PPBB) pada 9 Februari 2026
7. Ikut serta dalam Rapat Pleno Harmonisasi Atas RPermenperin tentang Verifikasi Penelusuran Teknis (VPT) Bidang Standardisasi Industri pada 9 Februari 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, selain itu efisiensi dilakukan pada anggaran konsumsi rapat. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas Zoom Meeting sesuai arahan pimpinan guna efisiensi anggaran yang masih dalam proses peninjauan ulang.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Kondisi ketidakstabilan geopolitik berdampak signifikan terhadap rantai pasok industri dalam negeri dan pangsa pasar ekspor nasional. Industri dalam negeri mengalami peningkatan harga bahan baku dan penurunan

produksi. Hal ini menyebabkan kinerja dan utilitas industri menjadi tidak optimal.

2. Ketidaktersediaan data capaian aktual kinerja sebagai basis kebijakan akibat adanya lag waktu rilis data dari mitra kerja eksternal dengan pengambilan keputusan internal.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada tahun 2026, maka dilaksanakan beberapa kegiatan dengan upaya menyusun rekomendasi perbaikan. Poin-poin penting yang menunjang keberhasilan dari beberapa program/kegiatan tersebut diantara adalah:

1. Dalam beberapa Rapat Koordinasi Industri AKFT, kementerian teknis dan seluruh *stakeholder* terkait telah berupaya mendorong transformasi industri yang adaptif, inovatif dan berkelanjutan.
2. Dalam rangka mitigasi dinamika perekonomian global akibat ketidakstabilan politik, perang dagang global, dan perubahan iklim global seluruh K/L dan *stakeholder* terkait berupaya menjaga stabilitas pemenuhan bahan baku, penguatan tata niaga impor dan peningkatan pangsa pasar ekspor.
3. Dalam rangka mengatasi hambatan akibat efisiensi anggaran, Asdep IAKFT mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia seperti melaksanakan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan ruang rapat kantor dan/atau menggunakan fasilitas *zoom online meeting* agar rencana aksi dapat tetap tercapai secara optimal. Selain itu, dilakukan penetapan revisi alokasi anggaran yang lebih dikontrol agar lebih optimal dan tepat sasaran sehingga rencana aksi dapat dicapai secara keseluruhan.
4. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian sebagai prasyarat dalam setiap permintaan data berkala yang diterbitkan oleh unit dimaksud.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

- 2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro
- 2.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri
- 2.3. Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro, antara lain:

1. Penyelesaian isu strategis dan penyusunan rekomendasi permasalahan dalam komoditas hilirisasi industri agro
2. Penyusunan alternatif dan rekomendasi pengembangan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun **keluaran yang dihasilkan** dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;

- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Undangan rapat dan daftar hadir rapat; (ii) Laporan/diskusi isu strategis dalam komoditas hilirisasi industri agro; (iii) Laporan/diskusi potensi pemenuhan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam, dsb.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

Adapun **keluaran yang dihasilkan** pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Laporan terkait alternatif kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro; (ii) Laporan terkait tindak lanjut penyusunan alternatif pengembangan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam, dsb.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan

hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;

- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain:
(i) Laporan terkait monitoring dan evaluasi kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro;
(ii) Laporan terkait Monitoring dan evaluasi konsep pengembangan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam, dsb

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain:
(i) Konsep dokumen rekomendasi terkait Hilirisasi Industri Agro; (ii) Konsep dokumen rekomendasi pemenuhan bahan baku berbasis sumber daya alam, dsb.

Adapun formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase penyelesaian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan keti}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun target triwulan I sebesar 20% didasarkan pada tren-tren di

Kemenko Perekonomian pada tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kebijakan pada tahun 2026.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 100% dari target Triwulan I Tahun 2026 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Hilirisasi Industri Agro	Persentase	20%	20%	100%

Realisasi triwulan I secara kumulatif mencapai target sebesar 20% dengan rincian:

- Pemetaan isu strategis dan permasalahan dalam komoditas hilirisasi Industri Agro dengan dilakukan Audiensi dengan PT HM Sampoerna pada 20 Januari 2026
- Pemetaan potensi pemenuhan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam dengan rangkaian rapat pembahasan Potensi Pengembangan Malapari dan Produk Hilirnya terutama Biofuel pada 12 Januari 2026, 5 Februari 2026 dan 20 Februari 2026, serta Audiensi dengan PT Lembata Hira Sejahtera pada 4 Maret 2026, Audiensi dengan PT Natural Bali Indonesia pada 21 Januari 2026

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian terkait Hilirisasi Industri Agro			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Pemetaan isu strategis dan permasalahan dalam komoditas hilirisasi Industri Agro	Terlaksana	Telah dilaksanakan rangkaian Pemetaan isu strategis dan permasalahan dalam komoditas hilirisasi Industri Agro melalui: • Sebagai Narasumber dalam Seminar dan Diskusi Panel “Peluang dan Tantangan Inovasi pada Industri Olahan Tembakau

			dan Dukungan Kebijakan Berbasis Risiko” tanggal 29 Januari 2026 • Hadir dalam FGD Harmonisasi Regulasi PP 28 Tahun 2024 dengan UU Kesehatan terhadap Industri Produk Tembakau di Indonesia tanggal 11 Februari 2026 • Hadir dalam Rapat Koordinasi Penguatan Pengaturan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar pada 23 Februari 2026 • Menghadiri Uji Publik Kajian Penentuan Batas Maksimal Nikotin dan Tar pada 10 Maret 2026
2.	Pemetaan potensi pemenuhan bahan baku industri nasional berbasis sumber daya alam	Terlaksana	• Audiensi dengan PT Lembata Hira Sejahtera pada 24 Desember 2025 • Audiensi dengan PT Natural Bali Indonesia pada 21 Januari 2026 • Audiensi dengan PT Lembata Hira Sejahtera pada 4 Maret 2026 • Melaksanakan Rapat Pembahasan Potensi Pengembangan Malapari dan Produk Hilirnya Terutama Biofuel pada 12 Januari 2026 • Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan Tanaman Malapari dan Produk Turunannya Khususnya Bioenergi pada 5 Februari 2026 • Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembahasan Pengembangan Tanaman Malapari Jenis Unggul dan Produk Turunannya Khususnya Bioenergi pada 20 Februari 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri Pesta Retail 2026 Sampoerna Retail Community (SRC) tanggal 26 Januari 2026.
2. Menghadiri Konsultasi Publik RKepmenkes tentang Pelaksanaan Edukasi Pilihan Sehat melalui Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Kalori pada Pangan Olahan Siap Saji pada 23 Januari 2026
3. Penyampaian Tanggapan Permohonan Penerbitan Persetujuan Impor (PI) Jagung Industri pada 13 Februari 2026

4. Penyampaian Tanggapan Pertimbangan Terkait Kuota Impor Beras Pecah dan Beras Ketan Pecah pada 19 Februari 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan rapat koordinasi, diskusi, dan audiensi menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, selain itu efisiensi dilakukan pada anggaran konsumsi rapat. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti monitoring dan evaluasi;
2. Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan fasilitas Zoom Meeting sesuai arahan pimpinan guna efisiensi anggaran yang masih dalam proses peninjauan ulang.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Kendala sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait industri agro akibat luasan cakupan pengembangan industri agro dan adanya irisan isu dengan Kementerian Koordinator lainnya.
2. Keterbatasan ketersediaan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian, disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme koordinasi internal di lingkungan unit terkait;
3. Pemblokiran anggaran pada masa transisi nomenklatur dan struktur organisasi di seluruh K/L serta arahan efisiensi anggaran oleh Presiden yang menyebabkan beberapa kegiatan di bidang Industri Agro tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Menyikapi adanya kebijakan efisiensi anggaran maka akan terus didorong kegiatan koordinasi secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*.
2. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna memastikan komunikasi lintas sektor berjalan efektif dalam implementasi kebijakan, serta mengoptimalkan kolaborasi teknis dalam integrasi data untuk menekan potensi perbedaan data.

2.2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri mencakup industri kimia hulu, industri kimia hilir, dan farmasi, dan industri pengolahan barang galian non logam, antara lain:

1. Penyelesaian isu strategis dan penyusunan rekomendasi dalam rangka mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri.
2. Pelaksanaan evaluasi kebijakan yang meliputi penyusunan Draft RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hingga pada penetapannya.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Undangan Rapat dan Daftar Hadir Rapat; (ii) Laporan Rapat/Diskusi Isu Strategis Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri; (iii) Laporan Rapat/Diskusi Evaluasi Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri, dsb.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Laporan terkait Penyelesaian Isu Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri; (ii) Laporan terkait Tindak Lanjut Penyusunan Draft RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dsb.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;

- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Laporan terkait Alternatif Penyelesaian Isu Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri; (ii) Rumusan RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dsb.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini antara lain: (i) Konsep Dokumen Rekomendasi dalam rangka mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri; (ii) Dokumen Penetapan Permenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dsb.

Adapun formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase penyelesaian Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan Ketiga} + \text{Nilai Tahapan Keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun target triwulan I sebesar 20% didasarkan pada tren-tren di

Kemenko Perekonomian pada tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kebijakan pada tahun 2026.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 100% dari target Triwulan I Tahun 2026 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri	Persentase	20	20	100

Realisasi triwulan I secara kumulatif mencapai target sebesar 20% dengan rincian:

- a. Penyelesaian isu strategis dan penyusunan rekomendasi dalam rangka mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri berada di tahap 1 (20%), yakni telah melaksanakan pemetaan isu strategis dan permasalahan dalam mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri antara lain terkait isu perizinan berusaha pada investasi proyek PT CAP; business matching pupuk area; ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan Obat Inovatif; isu strategis sektor ISKPBG; dan rencana investasi pada sektor industri semen; serta
- b. Pelaksanaan evaluasi kebijakan yang meliputi penyusunan Draft RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hingga pada penetapannya berada pada tahapan 1 (20%), yakni telah melaksanakan evaluasi kebijakan terkait usulan Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, Dan Pengendalian Kebijakan Terkait Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Pemetaan isu strategis dan permasalahan dalam mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri	Terlaksana	Telah dilakukan identifikasi Pemetaan isu strategis dan permasalahan dalam mendorong Penguatan Ekosistem Industri Kimia Dalam Negeri melalui : • Menghadiri rapat Harmonisasi Pencabutan Permenperin tentang Pemberlakuan SNI secara wajib untuk produk STTP dan Pupuk anorganik tunggal pada tanggal 27 Januari 2026; • Ikut serta pada Rapat Koordinasi Penyelesaian Isu Perizinan Berusaha pada Investasi Proyek PT Chandra Asri Alkali pada tanggal 30 Januari 2026; • Menghadiri Rapat Kerja Sekretariat Kawasan Ekonomi Khusus terkait pengembangan KEK Pariwisata Kesehatan tanggal 30 Januari 2026; • Keikutsertaan pada Rapat Fasilitasi Business Matching Pupuk Urea di Indonesia pada tanggal 2 Februari 2026; • Menghadiri kegiatan Workshop dan Konsultasi Strategi Nasional (Stranas) Peningkatan Ketersediaan, Aksesibilitas, dan Keterjangkauan Obat Inovatif pada tanggal 6 Februari 2026;

			• Menerima audiensi dari Chandra Asri Group pada tanggal 6 Februari 2026; • Mengadakan Diskusi Isu Strategis Sektor Industri Semen, Keramik, Dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam (ISKPBGN) pada tanggal 26 Februari 2026; • Turut serta pada Diskusi terkait rencana Investasi Industri semen (PT Bumi dan PT Kobexindo) pada tanggal 12 dan 16 Maret 2026.
2.	Pelaksanaan evaluasi kebijakan yang meliputi penyusunan Draft RPermenko tentang Koordinasi Percepatan Pengembangan dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hingga pada penetapannya	Terlaksana	• Mengagendakan Rapat Koordinasi Trilateral Eselon I sebagai Persiapan Rencana RPermenko dengan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kemenkes pada tanggal 20 Januari; • Menghadiri Seminar Internasional Penguatan Ekosistem Perdagangan dan Industri Halal untuk produk obat, vaksin dan produk biologi di BPOM tanggal 28 Januari 2026; • Melaksanakan Rapat Pembahasan tindak lanjut atas rencana RPermenko dengan K/L terkait tanggal 2 Februari 2026; • Mengadakan Rapat Pembahasan Draft RPermenko dengan Biro HO Kemenko Perekonomian pada tanggal 24 Februari 2026; • Mengadakan Diskusi Isu Strategis terkait Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, khususnya Pengembangan Industri BBO bersama BPOM

			pada tanggal 27 Februari 2026.
--	--	--	-----------------------------------

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah

1. Ikut terlibat pada Penyelesaian isu keterlambatan penerbitan sertifikat SNI sebagai tindak lanjut atas aduan pada kanal *debottlenecking* Satgas P2SP;
2. Turut hadir pada Rapat Koordinasi Tindak Lanjut RAN Indonesia Bebas Timbal dan Pemetaan Stakeholder RAN Indonesia Bebas Timbal pada tanggal 29 Januari dan 25 Februari 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah Mengimpeertimbangan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD), sosialisasi, dan rapat koordinasi sebagian besar masih menggunakan ke fasilitas ruang rapat kantor dan fasilitas *Zoom Meeting*, sebagai contoh Diskusi (i) Rapat Koordinasi Trilateral Persiapan Rencana RPermenko di Ruang Rapat Deputi V tanggal 20 Januari 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Penyesuaian terhadap harmonisasi penyusunan kebijakan yang membutuhkan waktu cukup lama dikarenakan kompleksitas pembagian kewenangan antar lembaga;
2. Hambatan birokrasi lintas kementerian/lembaga seperti adanya sejumlah reorganisasi pada kementerian/lembaga terkait menyebabkan perlunya *effort* lebih dalam berkoordinasi baik untuk pengenalan maupun memperoleh pandangan berupa masukan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan;
3. Validasi Data Multi Sektoral: menyebabkan hambatan dalam mengintegrasikan data seperti data ekspor-impor (HS Code) dengan data produksi domestik seringkali terhambat karena perbedaan standar pendataan antar instansi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Menyikapi adanya kompleksitas pembagian kewenangan antar lembaga dengan intens berkoordinasi guna menghindari tumpang tindih regulasi.

2. Menjalin konektivitas yang lebih erat antar pemangku kepentingan guna komunikasi lintas sektor yang efektif dalam implementasi kebijakan
3. Mengupayakan kolaborasi teknis dalam penyelarasan data guna menghindari *dispute* data termasuk melalui surat permohonan data.

2.3. Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik. Rekomendasi yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global, antara lain:

1. Pemetaan isu strategis dan permasalahan terkait peningkatan daya saing industri TPT dan Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna mengoptimalkan manfaat I-EU CEPA.
2. Pelaksanaan rangkaian kegiatan evaluasi kebijakan terkait peningkatan daya saing industri tekstil dan alas kaki di pasar domestik dan global.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;

- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya: (i) Laporan Diskusi Sinkronisasi Kebijakan dan Program Penguatan Daya Saing Industri Kulit dan Alas Kaki Nasional (sebagai tindak lanjut Munas XI APRISINDO); (ii) Laporan Pembahasan Rencana Pengembangan Industri Tekstil Tahun 2026 (rapat dengan Setkab); dan (iii) Laporan Rapat Pembahasan Roadmap Industri TPT 2026-2028 (rapat dengan Kemenperin).

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya Laporan Hasil Kajian Arah Kebijakan Revitalisasi Ekosistem Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Nasional (*kepada Bapak Menko Perekonomian sebagai tindak lanjut dari Closing Project Prospera*).

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;

- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini diantaranya: Laporan Monitoring dan Diskusi Kesiapan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dalam Mengoptimalkan Peluang IEU-CEPA.

Adapun formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama**

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua**

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga**

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- **Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat**

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- **Nilai Akhir Persentase penyelesaian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global**

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan Ketiga} + \text{Nilai Tahapan Keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 80% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun target triwulan I sebesar 20% didasarkan pada tren-tren di Kemenko Perekonomian pada tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kebijakan pada tahun 2026.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 39% dari target Triwulan I Tahun 2026 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.3 Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global	%	20	39	100

Realisasi triwulan I secara kumulatif mencapai target sebesar 39% dengan rincian:

- Kebijakan Ekosistem Industri TPT dan Alas Kaki berada di tahapan 1, 2 dan 4 (23%) yaitu dilakukan koordinasi terkait Kajian Ekosistem yang telah disusun sebelumnya, serta diskusi bersama stakeholders terkait mengenai ekosistem TPT secara menyeluruh.
- Kebijakan Sustainable Textile dan Budaya lokal berada di tahapan 1 (16%) yaitu peninjauan mengenai proposal wastra dan satgas vide ekraf dengan fokus pada industri fesyen.

Pelaksanaan kedua kebijakan di atas mendukung pencapaian target Persentase efektivitas penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dan Alas Kaki di Pasar Domestik dan Global.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.3 Persentase Keberhasilan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian terkait Peningkatan Daya Saing industri Tekstil dan Alas Kaki			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Pemetaan isu strategis dan	Terlaksana	Pada awal tahun, telah dilakukan pemetaan isu

	permasalahan terkait peningkatan daya saing industri TPT dan Alas Kaki, termasuk pemenuhan aspek keberlanjutan guna mengoptimalkan manfaat I-EU CEPA		strategis dan permasalahan peningkatan daya saing industri TPT serta Alas Kaki meliputi: • Ikut serta dalam Munas XI Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) (21 Januari 2026) • Diskusi Pembahasan Program dan Isu Strategis Industri Kulit dan Alas Kaki Tahun 2026 (4 Februari 2026) • Menghadiri Diskusi Pembahasan Rencana Pengembangan Industri Tekstil Tahun 2026 (19 Februari 2026) • Ikut serta dalam pembahasan awal Roadmap Industri TPT 2026-2028 (9 Maret 2026)
2.	Pelaksanaan rangkaian kegiatan evaluasi kebijakan terkait peningkatan daya saing industri tekstil dan alas kaki di pasar domestik dan global	Terlaksana	• <i>Closing Project</i> Kolaborasi dengan Prospera Terkait Kajian Ekosistem Industri TPT (19 Februari 2026) • Monitoring dan Diskusi Kesiapan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dalam Mengoptimalkan Peluang IEU-CEPA (22 Januari 2026)

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya komprehensif lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja tersebut adalah

1. Persiapan laporan kajian ekosistem TPT yang telah disusun bersama Prospera kepada Bapak Menko Perekonomian untuk mendapat arahan lebih lanjut.
2. Ikut terlibat dalam beberapa forum diskusi awal mengenai Revitalisasi Industri TPT, salah satunya isu pembentukan BUMN Tekstil.
3. Melakukan diskusi terkait penyusunan proposal Satgas Tourism vide Ekraf sebagai akselerator ekonomi nasional melalui industri kreatif, khususnya sektor fesyen.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya yakni melakukan pelaksanaan rapat koordinasi selain menggunakan fasilitas ruang rapat kantor, juga menggunakan fasilitas Zoom Meeting. Sebagai contoh: Diskusi Pembahasan Program dan Isu Strategis Industri Kulit dan Alas Kaki Tahun 2026 dilaksanakan secara *hybrid*.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Pemblokiran anggaran serta arahan efisiensi anggaran oleh Presiden yang menyebabkan keterbatasan pelaksanaan kegiatan di bidang TPT dan Alas Kaki.
2. Keterbatasan ketersediaan data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian, disebabkan oleh belum optimalnya mekanisme koordinasi internal di lingkungan unit terkait.
3. Keterbatasan koordinasi dengan Prospera perihal persiapan laporan kajian ekosistem TPT kepada Pak Menko, akibat restrukturisasi organisasi oleh Prospera.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mempersiapkan dengan matang untuk pelaporan kajian Ekosistem TPT kepada Bapak Menko Perekonomian dengan berkoordinasi intens dengan Prospera dan pimpinan (Pak Deputi).
2. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian sebagai prasyarat dalam setiap permintaan data berkala.
3. Terus memantau isu TPT dan Alas Kaki untuk menjaga ekosistem industri dalam negeri tetap kondusif dan memastikan efektivitas regulasi mendukung pertumbuhan industri lokal.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: “Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil”.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\Sigma \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survei}}{\text{Jumlah Item survei}}$$

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja IKU Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil memiliki target yaitu 3 dari 4 atau memuaskan. Survei ditargetkan untuk dilaksanakan pada triwulan II dan Triwulan IV berdasarkan tren tahun sebelumnya.

Hingga akhir triwulan I tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil belum dapat diukur karena survei evaluasi tahap pertama belum dilaksanakan. Adapun ringkasan pencapaian Tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Indeks	3 dari 4*	N/A	N/A

*target tahun 2026

Dalam pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil realisasi pada triwulan I tahun 2026 belum dapat diukur karena survei evaluasi tahap pertama belum dilaksanakan. Capaian kinerja belum dapat diukur karena rencana aksi pada triwulan I hanya berupa penyiapan survei terkait Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penyiapan survei (pengumpulan data responden dan lainnya) terkait Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Semester I	Terlaksana	Telah dilaksanakan identifikasi responden Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait.

Selama Triwulan I, telah dilaksanakan identifikasi calon responden survei kepuasan layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil. Calon responden survei di targetkan sebanyak 20-30 orang dengan keterwakilan dari industri agro 10 orang, industri kimia & farmasi 10 orang dan industri TPT 10 orang. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah pelaksanaan rapat untuk membahas identifikasi responden survei yang dilaksanakan di dalam kantor, serta menggunakan *google form* sebagai instrumen pengumpulan data.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target yang ditetapkan yaitu 1) belum terdapat panduan seperti mekanisme survei dan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada calon responden; dan 2) calon responden survei layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pada tahap ini belum mempertimbangkan proporsi keterwakilan dari kementerian/lembaga, pelaku usaha, asosiasi, dan masyarakat umum karena re-organisasi. Namun demikian, Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil tetap menyiapkan upaya dan rekomendasi perbaikan agar sesuai target pada triwulan II, kegiatan survei tahap 1 dapat terlaksana. Selanjutnya, agar kegiatan dapat berjalan lancar, kami berkoordinasi dengan tim sekretaris deputy terkait mekanisme survei.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil”.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Adapun target triwulan I sebesar 25% didasarkan pada tren-tren pemenuhan target tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang terealisasi sebesar 25% dari target Tahun 2026 sebesar 92% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Presentase	25	25	100

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Rencana aksi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 adalah : Penyusunan Rencana Aksi RB yang terdiri dokumen PK, Manual IKU, Rencana Aksi PK, optimalisasi implementasi arsip digital melalui SRIKANDI serta penyusunan narasi kinerja Triwulan I, dan lainnya.

Adapun pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	•Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU •Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I •Penyusunan Renja 2027 •Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI Triwulan I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dengan hasil Penetapan Perjanjian Kinerja pada level eselon II. Telah ditetapkan Manual IKU serta Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada level eselon II.

			Telah disusun laporan kinerja triwulan I 2026 pada bulan April 2026 Telah disusun Rancangan awal Renja K/L tahun anggaran 2027 Telah dilaksanakan pengelolaan dokumen kearsipan yang mendukung implementasi arsip digital melalui aplikasi SRIKANDI secara berkala
--	--	--	---

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Sebagai contoh penyusunan PK, Manual IKU, dan Rencana Aksi dilaksanakan di dalam kantor, penyusunan Narasi Kinerja dilaksanakan di dalam kantor, dan penggunaan aplikasi SRIKANDI untuk memudahkan semua pegawai mengakses dengan cepat dokumen kearsipan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah beberapa kegiatan merupakan inisiatif baru di awal tahun sehingga masih dalam proses penjajakan di triwulan I. Selain itu, juga karena terdapat pemberlakuan efisiensi dan blokir anggaran K/L sehingga penyerapan anggaran masih kecil.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka upaya atau rekomendasi perbaikan yang dilakukan diantaranya adalah penetapan revisi alokasi anggaran yang lebih dikontrol agar lebih optimal dan tepat sasaran sehingga rencana aksi dapat dicapai secara keseluruhan.